

PERAN KESULTANAN SERDANG DALAM PENYEBARAN ISLAM DI SERDANG BEDAGAI

Putri Grace Nola Pasaribu, Silfira Elisy Putri, Nadia Silvia, Wishmar Siregar,
Wahyu Renaldi Siahaan.

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

putripasaribuan@gmail.com¹, silfiraelisaputri0551@gmail.com²,
vivonadia@gmail.com³, siregarwishmar@gmail.com⁴,
wahyurenaldi40@gmail.com⁵.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide knowledge to the general public that in the Serdang Bedagai area there was once a sultanate that was famous throughout the Malay Peninsula, namely the Serdang Sultanate. This study also aims to add written references that show the existence of the Serdang Sultanate. The method used in this study is a library study approach, or what is often called literature research, which focuses on collecting information from various written sources such as books, journals, articles, reports, and other documents related to the topic being studied. This approach is very effective when research does not require direct data from the field, but rather an analysis of existing texts or literature. The findings of this study indicate that the establishment of the Serdang Sultanate began with a dispute that arose due to a dispute over office between the second and third sons of the Deli Sultanate which occurred around 1723 AD, namely between Tuanku Pasutan and Tuanku Umar Johan Alamshah. Since its inception, the Serdang Sultanate experienced a golden age, the peak of which occurred during the reign of Sultan Thaf Sinar Basrshah (1817-1850), which was marked by rapid development and bustling trade activities, so that the Serdang area became prosperous. However, the decline of the Serdang Sultanate occurred during the reign of Sultan Basyaruddin Shariful Alam Syah. During this period, many conflicts occurred among regional officials who submitted, coupled with the influence of the Dutch which emerged in 1862.

Keywords: Serdang Sultanate, Spread of Islam, Serdang Bedagai

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum bahwa di kawasan Serdang Bedagai pernah ada sebuah kesultanan yang terkenal hingga ke Semenanjung Malaya, yaitu Kesultanan Serdang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah referensi tulisan yang

menunjukkan keberadaan Kesultanan Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka, atau yang sering disebut penelitian literatur, yang memfokuskan pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini sangat efektif ketika penelitian tidak memerlukan data langsung dari lapangan, melainkan lebih kepada analisis terhadap teks atau literatur yang sudah ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian Kesultanan Serdang dimulai dari sengketa yang muncul akibat pertikaian jabatan antara putra kedua dan ketiga dari Kesultanan Deli yang terjadi sekitar tahun 1723 M, yaitu antara Tuanku Pasutan dan Tuanku Umar Johan Alamshah. Sejak awal berdirinya, Kesultanan Serdang mengalami masa kejayaan yang puncaknya terjadi pada era pemerintahan Sultan Thaf Sinar Basrshah (1817-1850), yang ditandai dengan perkembangan pesat dan aktivitas perdagangan yang ramai, sehingga kawasan Serdang menjadi makmur. Namun, kemunduran Kesultanan Serdang terjadi pada waktu pemerintahan Sultan Basyaruddin Shariful Alam Syah. Pada masa ini, banyak konflik yang terjadi di antara para pejabat daerah yang tunduk, ditambah dengan pengaruh Belanda yang muncul pada tahun 1862.

Kata Kunci: Kesultanan Serdang, Penyebaran Islam, Serdang Bedagai

A. Pendahuluan

Kesultanan Serdang merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di Sumatera Utara dan termasuk dalam jajahan Kesultanan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda (Mailin, 2021). Dahulu, Kesultanan Serdang merupakan bagian dari Kesultanan Deli, dan pemisahan ini terjadi akibat konflik saudara untuk merebutkan tahta pada masa itu. Konflik tersebut muncul setelah meninggalnya Tuanku Panglima Paderap yang memerintah hingga tahun 1720. Pada saat itu, Kesultanan Deli mengalami

perpecahan karena pengaruh Kerajaan Siak di Sumatera Timur serta pertempuran kekuasaan di istana Kesultanan Deli antara Tuanku Panglima Pasutan Kejeruan Santun dan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan, yang merupakan keturunan Tuanku Panglima Paderap. Puncak dari konflik ini terjadi pada tahun 1723 ketika Tuanku Umar Johan Alamshah kalah dalam peperangan melawan saudaranya, Tuanku Panglima Pasutan. Sebagai akibat dari kekalahan tersebut, Tuanku Umar Johan Alamshah beserta ibunya

terpaksa mengungsi ke Kampung Besar (Serdang). Kemenangan ini menyebabkan tahtanya Kesultanan Deli jatuh ke dalam kendali Tuanku Panglima Pasutan.

Istana Kesultanan Serdang berasal dari upaya besar yang dilakukan oleh Tuanku Umar Johan Pahlawan Alam Shah Kejuruan Junjungan, yang memulai pembangunan Istana Tanjung Puteri. Pada tahun 1750, Tuanku Umar, yang kemudian diangkat sebagai Sultan Serdang yang pertama, menciptakan sejarah dengan mendirikan istana yang megah ini. Berlokasi di Kampong Besar Serdang, Istana Tanjung Puteri menjadi simbol penting yang tetap berdiri selama masa pemerintahan Tuanku Umar Junjungan, yang juga dikenal sebagai Sultan Serdang I. Istana Tanjung Puteri tidak hanya merupakan bangunan fisik, tetapi juga menggambarkan peranan vital dalam pusat administrasi. Langkah Tuanku Umar untuk mendirikan bangunan ini sangat strategis karena mencerminkan fungsinya sebagai tempat tinggal resmi Sultan. Istana ini bukan sekadar struktur yang indah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan pengambilan

keputusan bagi Kesultanan Serdang (Azhari dan Et. al. , 2013).

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945 dan diikuti dengan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, terjadi perubahan lagi. Kesultanan Serdang yang awalnya menjadi bagian dari Sumatra Timur, mulai tahun 1950 beralih menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Utara hingga kini. Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, wilayah yang dulunya dan masih merupakan bagian dari Kesultanan Serdang meliputi: Percut, Perbaungan, Sungai Ular, Sungai Serdang, Padang, Bedagai, Sinembah, Batak Timur, Negeri Dolok, Batubara (Lima Laras), Serbajadi, Denai, Patumbak, Rantau Panjang, Bandar Labuhan, Lengo Seperang/Kwala Namu, Pantai Cermin, Pertumbukan/Galang, Medan Senembah, Tambak Cikur, Rantau Panjang, hingga Lubuk Pakam, dan lain-lain (Nusantara, 2022). Karena terbatasnya tulisan ilmiah yang mengulas sejarah Kesultanan Serdang, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejarah Kesultanan Serdang agar masyarakat umum memahami bahwa

di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pernah terdapat sebuah kerajaan yang terkenal hingga ke Semenanjung Tanah Melayu, serta untuk menambah referensi tulisan mengenai sejarah Kesultanan Serdang demi menegaskan keberadaan Kesultanan Serdang di masa lalu.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan, atau yang biasa dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah cara yang mengandalkan pengumpulan informasi dari tulisan-tulisan seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini sangat bermanfaat ketika penelitian tidak membutuhkan data langsung dari lapangan, melainkan lebih kepada analisis terhadap teks atau literatur yang sudah ada. Dalam konteks jurnal ilmiah, studi kepustakaan bertujuan untuk membangun dasar teori, mendeteksi celah dalam penelitian, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang sedang dibahas.

Proses penelitian dengan metode studi kepustakaan dimulai dengan memilih topik yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, peneliti mengeksplorasi informasi untuk memastikan topik tersebut layak dan relevan dengan bidang ilmu yang sedang diteliti. Langkah berikutnya adalah menetapkan fokus penelitian yang akan menjadi pusat dari studi literatur tersebut. Peneliti kemudian mengumpulkan sumber data, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Setelah data terkumpul, peneliti membaca dan menganalisis sumber-sumber tersebut dengan cermat, mencatat ide-ide pokok, argumen, dan hasil yang relevan. Proses ini diakhiri dengan penyusunan catatan penelitian yang teratur untuk membantu dalam menarik kesimpulan. Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup tinjauan literatur, analisis, dan kesimpulan yang diambil dari studi kepustakaan tersebut.

Metode ini memiliki sejumlah ciri khas, antara lain: data yang digunakan bersifat sekunder, tidak memerlukan penelitian di lapangan, dan fokus pada analisis teks. Selain

itu, penelitian kepustakaan juga bersifat adaptif dan dapat dilaksanakan di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, humaniora, dan ilmu alam. Dengan demikian, studi kepustakaan menjadi metode yang efektif untuk membangun teori dasar, mengembangkan hipotesis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu melakukan penelitian di lapangan secara langsung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Kesultanan Serdang

Nama Serdang Bedagai berasal dari dua kerajaan yang pernah berkuasa di area itu, yaitu Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Kesultanan Serdang dimulai saat terjadi konflik untuk mendapatkan tahta kesultanan Deli setelah kematian Tuanku Panglima Paderap, yang merupakan pendiri kesultanan Deli, pada tahun 1723. Tuanku Gandar Wahid, putra kedua Tuanku Panglima Paderap, naik tahta tanpa memperhatikan saudaranya, Tuanku Jalaludin, dan adiknya, Tuanku Umar. Tuanku Jalaludin tidak dapat berbuat banyak karena mengalami cacat fisik,

sedangkan Tuanku Umar terpaksa melarikan diri ke daerah Serdang.

Sejarah munculnya Kesultanan Serdang dimulai dari konflik dalam Kesultanan Deli. Pada tahun 1723, saat Tuanku Panglima Paderap yang merupakan Raja Ketiga Kesultanan Deli sedang memimpin, terjadi ketegangan antara dua putra raja, yaitu putra kedua dan ketiga. Permasalahan ini timbul karena putra sulung raja yang diharapkan menjadi penggantinya memiliki cacat pada penglihatannya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja. Akhirnya, hanya salah satu dari putra kedua dan ketiga, yaitu Tuanku Pasutan atau Tuanku Umar, yang dapat menduduki posisi raja berikutnya di Kesultanan Deli. Tuanku Pasutan, sebagai putra kedua, sangat ingin menjadi raja dan meraih tahta Kesultanan Deli, sehingga ia mengusir adiknya Tuanku Umar dan ibunya ke wilayah Serdang. Inilah yang menandai awal berdirinya Kesultanan Serdang.

Melihat latar belakang kehidupannya, seharusnya Tuanku Umar adalah yang paling berhak untuk menjadi raja karena ia adalah putra dari permaisuri. Sebaliknya,

Tuanku Pasutan merupakan anak dari selir raja. Namun, karena Tuanku Umar masih muda, ia dengan mudah disingkirkan dari Kesultanan Deli.

Ketika Tuanku Pasutan berhasil mengambil alih tahta Kesultanan Deli, tidak semua bangsawan dan raja-raja dari daerah sekitarnya mengakui Tuanku Pasutan sebagai Sultan Deli. Beberapa di antara mereka menolak kepemimpinannya dan mendukung Tuanku Umar Johan Alamshah sebagai sultan yang sah. Dalam catatan sejarah lokal, raja-raja yang memberi dukungan kepada Tuanku Umar Johan Alamshah termasuk Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Aceh yang dikenal sebagai Kejeruan Lumu (Ichwan, Azhari, 2013).

Untuk mencegah terjadinya perang saudara yang berkepanjangan, Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu) sepakat untuk mengangkat Tuanku Umar sebagai Raja Serdang pertama di tahun 1723. Sejak saat itu, Kerajaan Serdang berdiri sebagai bagian dari Kerajaan Deli. Daerah yang termasuk

dalam Kesultanan Serdang meliputi Batang Kuis, Padang Bedagai, Percut, Senembah, Araskabu, dan Ramunia. Selanjutnya, melalui pernikahan, daerah Perbaungan juga menjadi bagian dari Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang bertahan lebih dari dua abad, dari tahun 1723 hingga 1946 (Nu' man, 2017).

Di bawah pimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Deli aktif berupaya untuk menghapus kekuatan yang masih tersisa dari Kerajaan Haru, yang pada waktu itu mendapatkan dukungan dari bangsa Portugis. Selain itu, proses penyebaran Islam terus dilakukan di daerah-daerah pedalaman.

Kesultanan Deli, yang masih merupakan bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam, memperoleh dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang memperkuat posisinya dalam konteks politik dan budaya daerah. Pada tahun 1632, tercatat bahwa di bawah kepemimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Deli menerima dukungan yang cukup besar dari Datuk Imam Surbakti, pemimpin dari Kerajaan Sunggal

(Abdul Gani Jamora Nasution et al. , 2022).

Kerjasama ini semakin diperkuat oleh pernikahan antara Puteri Nan Baluan Beru Surbakti, adik dari Datuk Imam Surbakti, dengan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Pernikahan ini tidak hanya memiliki dimensi politik, namun juga memperkuat hubungan antara Kesultanan Deli dan Kerajaan Sunggal. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Kesultanan Deli, meskipun masih berada dalam naungan Kesultanan Aceh Darussalam, dapat membangun kemitraan dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak di sekitarnya.

Usaha untuk meruntuhkan sisa-sisa kekuasaan Kerajaan Haru yang didukung Portugis menunjukkan keberanian dan ketekunan Kesultanan Deli di bawah kepemimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Pernikahan strategis antara Puteri Nan Baluan Beru Surbakti dan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan tidak hanya memperkuat hubungan antarnegara, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam proses islamisasi dan

penyebaran pengaruh Kesultanan Deli ke daerah-daerah pedalaman.

Setelah kepergian Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan pada tahun 1641, kendali atas Kesultanan Deli berpindah kepada anaknya, Tuanku Panglima Perunggit (1614-1700) yang dikenal sebagai Panglima Deli (Samin, 2015). Dalam masa ini, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Tuanku Panglima Perunggit untuk berpisah dari kekuasaan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1669, Kesultanan Deli secara resmi menyatakan kemerdekaannya, mengakhiri hubungan dengan Kesultanan Aceh. Di bawah pimpinan Tuanku Panglima Perunggit, Kesultanan Deli menjadi sebuah entitas yang mandiri dan mengelola daerahnya secara otonom.

Perubahan ini didukung oleh Belanda, yang saat itu sudah membangun benteng pertahanan di Malaka. Dengan kepentingan politik dan ekonominya di kawasan tersebut, Belanda memandang deklarasi kemerdekaan Kesultanan Deli sebagai peluang untuk memperluas

pengaruhnya di Hindia Belanda. Bantuan dari Belanda memberikan kekuatan bagi Kesultanan Deli dalam menghadapi kemungkinan tekanan dari Kesultanan Aceh atau pihak lain yang mungkin menentang pemisahan itu. Melalui deklarasi kemerdekaan pada tahun 1669 dan dukungan Belanda, Kesultanan Deli mampu melanjutkan perjalanannya sebagai entitas yang independen dan otonom di tengah perubahan politik yang berlangsung di wilayah tersebut. Perubahan ini juga menandai dimulainya hubungan erat antara Kesultanan Deli dan Belanda, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar dalam sejarah Hindia Belanda (Azhari dan Et. al. , 2013).

Setelah Sultan Thaf Sinar Bashar Shar meninggal dunia, tampuk pemerintahan berpindah ke tangan Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah. Di bawah kepemimpinannya, berbagai perselisihan baik di dalam maupun di luar kerajaan muncul. Di samping konflik dengan Kesultanan Deli terkait ekspansi wilayah, Serdang juga berhadapan dengan pengaruh Belanda yang mulai datang pada tahun 1862. Melalui Acte van

Erkenning yang dikeluarkan pada 16 Agustus 1862, Kesultanan Serdang akhirnya terpaksa mengakui kekuasaan Belanda.

Selepas wafatnya Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah, posisi kepemimpinan diisi oleh Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah. Pada periode pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah, pusat pemerintahan Kesultanan Serdang mengalami pemindahan. Awalnya, Istana Darul Arif terletak di wilayah Rantau Panjang, tetapi pada tahun 1984, istana tersebut berpindah ke Kota Galuh, Perbaungan seiring dengan pemindahan pusat Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang yang berada di Kota Galuh didirikan oleh Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah pada tanggal 29 Juli 1889. Pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Serdang ini merupakan tindakan untuk melawan meningkatnya pengaruh penjajahan Belanda.

Pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Serdang terjadi ketika Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah menolak permintaan pemerintah kolonial Belanda untuk memindahkan ibukota ke Lubuk

Pakam. Sebagai tanda penolakan, ia membangun istana baru dan mendirikan Masjid Raya Sulaimanayah. Selain itu, Sultan Sulaiman juga membuat pasar dan kompleks toko yang dinamakan Simpang Tiga Perbaungan.

Dalam bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah Syairrussulaiman di Perbaungan. Di samping itu, Sultan Sulaiman juga dikenal memiliki ketertarikan pada seni dan budaya. Pada tahun 1898, ia mengunjungi Kesultanan Kedah (Malaysia) untuk memperkuat kerjasama, terutama di sektor pertanian. Kesuksesannya di bidang pertanian membuat Sultan Kedah berharap ia bisa mengajarkan teknik pengelolaan dan isu-isu terkait pengembangan ketahanan pangan. Sebagai tanda penghargaan, Sultan Kedah menghadiahkan seni pertunjukan berupa Teater Makyong (Nurmainzar, 2012). Setiap tahun, kesultanan rutin mengadakan pertunjukan teater ke berbagai daerah di Serdang yang menampilkan cerita-cerita dari Melayu, India, dan Barat untuk menghibur masyarakat secara gratis.

Masa Kejayaan Kesultanan Serdang

Kesultanan Serdang mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Thaf Sinar Bashar Shah (1817-1850). Pada saat itu, penerapan tradisi Melayu yang berlandaskan Islam mendapatkan penghargaan tinggi. Hal ini berimplikasi pada banyaknya masyarakat Batak Hulu yang berpindah agama ke Islam. Selama periode pemerintahannya, daerah Serdang menjadi wilayah yang damai, nyaman, dan makmur berkat kemajuan pesat dalam perdagangan, khususnya lada dan hasil hutan antara Serdang dan Pulau Pinang. Wilayah Kesultanan Serdang juga mengalami perluasan mencakup Percut, Padang dan Bedagai, Senembah, Batak Timur Dusun hingga Negeri Dolok (Muhammad Syukri Ramadhan, 2018).

Bahkan, saat Sultan Thaf Sinar Baharshah memimpin, ia menjalankan pemerintahan dengan lembut, menunjukkan toleransi yang tinggi serta selalu berdiskusi dengan daerah-daerah yang berada di bawah naungan Kesultanan Serdang. Ia juga mendukung pengembangan ilmu

pengetahuan dan memiliki kapal dagang pribadinya. Dalam catatan John Anderson ketika ia berkunjung ke Serdang pada tahun 1823 (Herviyunita, Irwansyah, dan Devianty, 2021), tertulis sebagai berikut:

1. Aktivitas perdagangan antara Serdang dan Pinang sangat sibuk (terutama dalam lada dan produk hutan).
2. Sultan Thaf Sinar Basarshah sangat menghargai ilmu pengetahuan.
3. Ekonomi rakyat berkembang pesat, dan banyak pedagang dari wilayah pantai barat Sumatra melewati pegunungan Bukit Barisan untuk menjual produk mereka ke luar negeri melalui Serdang.
4. Sultan Thaf Sinar Basarshah dikenal sangat toleran dan senang berdiskusi.
5. Pajak di Serdang cukup bersahabat.

Itulah alasan mengapa sektor rakyat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dan banyak pedagang dari bagian barat Sumatra menjual produk mereka ke luar negeri melalui wilayah Serdang. Dia juga menjalin kesepakatan perdagangan dengan

Inggris pada tahun 1823. Pada waktu itu, nilai ekspor mencapai 8.000 pikul, yang terdiri dari lada, tembakau, kacang putih, emas, dan kapur barus. Sementara itu, Inggris mengirimkan kain-kain yang dibuat di Eropa. Nama Kesultanan Serdang sangat terkenal dan diakui di negara-negara lain hingga ke Semenanjung Melayu. Banyak kerajaan lainnya, seperti Padang, Bedagai, dan Senembah, meminta bantuan militer dari Kesultanan Serdang.

Masa Keruntuhan Kesultanan Serdang

Kemerosotan Kesultanan Serdang dimulai pada periode kepemimpinan Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah, yang ditandai oleh kedatangan Belanda. Sebagai respons, Sultan Serdang meminta pertolongan kepada Kesultanan Aceh Darussalam untuk melawan para penjajah. Sebagai balasannya, pada tahun 1854, Sultan Aceh Darussalam memberikan gelar “Wazir Sultan Aceh” kepada Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah yang juga dikenal dengan gelar Mahor Cap Sembilan.

Pada masa pemerintahan, banyak terjadi perselisihan di antara

para pejabat di wilayah yang dikuasai Kesultanan Serdang, sehingga posisi pejabat tinggi, wazir, dan raja-raja dari daerah taklukan Serdang sering kali berpindah. Di lain pihak, ketegangan antara Kesultanan Serdang dan Kesultanan Deli terkait perluasan wilayah semakin meningkat. Pada waktu yang bersamaan, Kesultanan Serdang juga harus menghadapi gangguan dari penjajah Belanda. Namun, karena dominasi Belanda yang sangat kuat serta ditandatanganinya *Acte Van Erkenning* pada 16 Agustus 1862, Kesultanan Serdang akhirnya harus menyerah kepada Belanda. Tindakan semena-mena Belanda semakin meningkat ketika Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah berangkat ke Jepang. Dalam kondisi ini, Belanda mengambil kesempatan untuk mengecilkan wilayah Kesultanan Serdang. "Tindakan semena-mena Belanda mengakibatkan perubahan dalam struktur orang-orang berpengaruh dengan penghapusan beberapa jabatan pemerintahan, termasuk raja muda dan wazir paduka setia maharaja" (Khairuddin, 2016).

Selain akibat dari pendudukan Belanda, jatuhnya Kesultanan

Serdang juga dipicu oleh semakin bertambahnya ketegangan antara Serdang dan Deli. Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadi suatu "Revolusi Sosial" di wilayah Sumatra Timur. Para pendukung Republik yang berhaluan komunis menuduh raja dan para bangsawan sebagai pengkhianat lantaran dianggap sebagai pelayan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam proses revolusi sosial itu, raja-raja ditangkap dan beberapa di antaranya dibunuh.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang kini dikenal sebagai Kesultanan Serdang dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Deli. Pemecahan kekuasaan ini terjadi akibat konflik di antara anggota keluarga yang mengakibatkan terbaginya wilayah. Perbaungan kemudian menjadi pusat administrasi Kesultanan Serdang setelah dipindahkan dari Rantau Panjang dan mengalami masa kejayaan di bawah Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817-1850).

Pada periode ini, penerapan Adat Melayu yang berpijak pada ajaran Islam sangat dihargai, yang menghasilkan banyak warga Batak Hulu yang memeluk agama Islam. Selama kepemimpinannya, Serdang mengalami ketenangan dan

kemakmuran berkat perkembangan perdagangan yang pesat. Nama Kesultanan Serdang begitu dikenal dan dihormati oleh wilayah lain hingga Semenanjung Tanah Melayu. Banyak kerajaan seperti Padang, Bedagai, dan Senembah meminta dukungan militer dari Kesultanan Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Jamora Nasution, F. S. R., Zainuri, H. S., & Siregar, N. A. (2022). Kebijakan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alamsyah Tahun 1924-1945. *Ulin Nuha Journal*, 1(1), 18–27.
- Azhari, P. I., & Et.Al. (2013). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam Pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah (Abdurrahman (Ed.)). Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri.
- Herviyunita, F., Irwansyah, I., & Devianty, R. (2021). Kesultanan Serdang dan Jejak Peninggalannya. *Local History & Heritage*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.97>
- Ichwan, Azhari, dkk. (2013). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Shariful Alamsyah. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI.
- Khairuddin. (2016). Peran Kesultanan Serdang Dalam Pengembangan Islam Di Serdang Bedagai.
- Mailin, M. (2021). Peran Sultan Iskandar Muda dalam Pengembangan Islam dan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.37064/jki.v8i1.9478>
- Muhammad Syukri Ramadhan. (2018). Politik Islam Melayu “Studi Kebijakan Politik Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah di Serdang Tahun 1881-1946 Masehi.”
- Nu'man, B. (2017). Jelajah Sumatra Utara: Kemegahan Arsitektur Peninggalan Bersejarah. Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara.
- Nurmaizar, N. (2012). Tari Dalam Teater Tradisional Makyong Di Sumatera Utara. *Jurnal Seni Tari*, 1(2), 1–16. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gesture/article/view/875>
- Prayogo, A., Harahap, I., Nasution, R. D., & Astaman, R. B. (2024). Preservasi Sejarah: Eksplorasi Warisan Kesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai. *AHKAM*, 3(1), 49-66. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2479>
- Ricu Sidiq, N, N., Sari, I. P., & Olivia, F. (2022). Sejarah Berdirinya Kesultanan Serdang 1723-1946. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2), 89–

102.

<https://doi.org/10.21009/JPS.112.05>

Samin, S. M. (2015). Kerajaan Dan Kesultanan Dunia Melayu: Kasus Sumatra Dan Semenanjung Malaysia. *Criksetra, Jurnal*, 4(7), 69.